

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	12
1.3. Tujuan Penelitian	12
1.4. Kegunaan Penelitian	12
1.5. Sistematika Penulisan	13
BAB II LANDASAN TEORI DAN KONSEPTUAL	15
2.1. Landasan Teori	15
2.1.1. Tanggung jawab hukum	15
2.1.1.1. Tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta secara perdata	16
2.1.1.2. Tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta secara pidana	18
2.1.1.3. Tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta secara kode etik	36
2.1.2. Peran Pejabat Pembuat Akta dalam pembuatan Akta Jual Beli hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun	46
2.1.3. Akta Jual Beli hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun	55

2.2. Landasan Konseptual	59
2.2.1. Tentang kesesatan (<i>dwaling</i>)	64
2.2.2. Tentang ancaman (<i>bedreiging</i>)	67
2.2.3. Tentang tipuan (<i>bedrog</i>)	67
2.2.4. Tentang penyalahgunaan keadaan (<i>Misbruik van Omstandigheden</i>)	68
BAB III METODE PENELITIAN	70
3.1. Tipe Penelitian	72
3.2. Jenis Data	73
3.3. Cara Perolehan Data	74
3.3.1. Studi dokumen atau bahan pustaka	75
3.3.2. Wawancara	76
3.4. Pendekatan	80
3.5. Analisa Data	83
BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN	85
4.1. Hasil Penelitian	85
4.1.1. Putusan nomor 2015/Pid.B/2010/PN.JKT.PST	85
4.1.2. Putusan nomor 603/Pid.B/2013/PN.Jkt.Tim	93
4.1.3. Keterangan ahli	96
4.2. Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Yang Aktanya Tersebut Mengandung Cacat Hukum Dan Menimbulkan Akibat Pidana	100
4.2.1. Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta yang aktanya tersebut mengandung cacat hukum dan menimbulkan akibat pidana dalam kasus putusan nomor 2015/Pid.B/2010/PN.JKT.PST	100
4.2.2. Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta yang aktanya tersebut mengandung cacat hukum dan menimbulkan akibat pidana dalam kasus putusan nomor 603/Pid.B/2013/PN.Jkt.Tim	116

4.3. Kedudukan Hukum Pejabat Pembuat Akta Terhadap Akta Yang Mengandung Cacat Hukum Dan Menimbulkan Akibat Tersebut Dalam Sengketa Pidana	136
4.3.1. Kedudukan hukum Pejabat Pembuat Akta terhadap akta yang mengandung cacat hukum dan menimbulkan akibat tersebut dalam sengketa pidana dalam kasus putusan nomor 2015/Pid.B/2010/PN.JKT.PST	136
4.3.2. Kedudukan hukum Pejabat Pembuat Akta Terhadap akta yang mengandung cacat hukum dan menimbulkan akibat tersebut dalam sengketa pidana dalam kasus putusan nomor 603/Pid.B/2013/PN.Jkt.Tim	140
BAB V PENUTUP	142
5.1. Kesimpulan	142
5.1.1. Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta yang aktanya tersebut mengandung cacat hukum dan menimbulkan akibat pidana	142
5.1.2. Kedudukan hukum Pejabat Pembuat Akta terhadap akta yang mengandung cacat hukum dan menimbulkan akibat tersebut dalam sengketa pidana	144
5.2. Saran	146

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN